



DECLARATIVE ILLOCUTIONARY ACTS ON THE 2019 ELECTION NEWS DISCOURSE: POLITOPRAGMATIC STUDY

TINDAK TUTUR ILOKUSIONER DEKLARATIF PADA WACANA BERITA PEMILU 2019: STUDI POLITIKOPRAGMATIK

Hari Kusmanto

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, e-mail: harikusmanto8@gmail.com

Article history:

Received
19 Januari 2019

Received in revised form
19 Maret 2018

Accepted
10 Mei 2019

Available online
Mei 2019

Keywords:
Declarative Speech Acts;
News; 2019 Election.

Kata Kunci:
Tindak Tutur Deklaratif;
Berita; Pemilu 2019.

DOI:
[10.22216/jk.v3i1.3904](https://doi.org/10.22216/jk.v3i1.3904)

Abstract

This study is aimed to identify declarative speech acts in the 2019 Indonesia election news headlines. The data in this study are the headline phrases that were taken from online news covering (CNN Indonesia, Liputan 6, Okezone News, Detikcom, News, Vivanews, Antara News, and Metronews). Documentation method was applied as data collection method by observing and taking notes techniques. The data were analysed by using the intralingual and pragmatic equivalent method. The validity of the data in this study use the theory of triangulation. The results of the study show that the form of declarative speech acts in the headline of the 2019 election include: (1) deciding as much as 38%; (2) ban 28.4; (3) cancel 26.6%; (4) approve as much as 7%. The results show that the electoral political in Indonesia has a tendency to lead on the particular political preferences decision.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penanda tindak tutur deklaratif pada judul berita pemilu 2019. Data dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat pada judul berita pemilu 2019. Sumber data dalam penelitian ini berupa judul berita pemilu 2019 bersumber pada pemberitaan online yang meliputi (CNN Indonesia, Liputan 6, Okezone News, Detikcom, Berita, Vivanews, Antara News, dan Metronews). Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, simak dan dilanjutkan dengan teknik catat. Analisis data penelitian menggunakan metode padan intralingual dan pragmatis. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan wujud tindak tutur deklaratif pada judul berita pemilu 2019 meliputi: (1) memutuskan sebanyak 38%; (2) melarang sebanyak 28,4; (3) membatalkan sebanyak 26,6%; (4) mengesahkan sebanyak 7%. Hal ini menunjukkan pemberitaan politik pemilu lebih banyak pada hal-hal yang sifatnya memutuskan diantaranya adalah memutuskan dukungan politik.

PENDAHULUAN

Pemilihan kata pada judul berita pemilu 2019 tidak hanya bersifat informatif. Tidak jarang judul berita bersifat untuk melakukan suatu tindakan tertentu bagi pembacanya. Artinya judul berita tersebut memiliki daya yang mampu menggugah emosi seorang pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya pemberitaan yang membuat pembaca untuk melakukan tindakan seperti tidak melakukan politik uang, memberikan rasa empati kepada salah satu paslon pada kontestasi pilpres 2019. Judul-judul berita tersebut dapat dianalisis dengan kajian pragmatik, yakni aspek tindak tutur.

Tindak tutur merupakan suatu bentuk tuturan yang bersifat informatif, fungsional, dan memiliki akibat tertentu. Yule (2014) mengatakan tindak tutur terbagi menjadi tiga, yakni tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Tindak tutur lokusi

Corresponding author.

E-mail addresses: harikusmanto8@gmail.com

merupakan tindak tutur dasar artinya tuturan tersebut hanya bersifat menginformasikan. Tindak tutur ilokusi tuturan yang selain menginformasikan juga memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya tindak tutur perlokusi selain menginformasikan dan memiliki fungsi tertentu tindak tutur perlokusi memiliki daya akibat. Artinya dalam tuturan tersebut ada sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh mitra tutur.

Penelitian mengenai pemberitaan pemilu dan tindak tutur yang telah dilakukan peneliti sebelumnya sebagai berikut: Poentarie (2015) meneliti kebenaran, relevansi, keseimbangan dan netralitas pemberitaan pemilu presiden 2014. Ratnasari dan Edel (2017) meneliti tindak tutur pada novel. Temuan Ratnasari dan Edel terdapat 42 ungkapan tindak tutur yang meliputi: 10 ungkapan asertif; 12 ungkapan direktif; 6 ungkapan komisif; 13 ungkapan ekpresif; dan satu ungkapan deklarasi. Penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya baik yang berkaitan dengan berita pemilu maupun tindak tutur, yang secara khusus mengkaji tindak tutur ilokusioner deklaratif belum dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tindak tutur ilokusioner deklaratif pada judul berita pemilu 2019.

Wacana merupakan rangkaian kata-kata dan kalimat-kalimat yang tersusun sedemikian rupa dan bermakna. Sobur (2015:10) menyatakan wacana merupakan rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam satu kesatuan yang koheren dan dibentuk berdasarkan unsur segmental dan suprasegmental. Berdasarkan hal tersebut wacana memiliki suatu tujuan, salah satunya adalah tindak tutur yang menghendaki pembaca untuk melakukan atau berbuat sesuatu.

Wacana berita memiliki ciri yang khas yang berbeda dengan beberapa teks yang lainnya. Wahyudin (dalam Badara, 2012) menyatakan berita adalah laporan mengenai fakta dan pendapat yang penting dan menarik bagi sebagian khalayak, dan harus dipublikasikan secepatnya kepada khalayak. Salah satu cara yang dapat digunakan secara cepat untuk mempublikasikan berita dengan media *online*, yakni berita *online*.

Suatu tindak tutur dimaksudkan oleh penutur kepada mitra tutur untuk melakukan suatu tindakan. Yule (dalam Yayuk, 2016) mengungkapkan tindak tutur merupakan tindakan-tindakan yang ditampilkan melalui suatu tuturan. Maksudnya seseorang dalam suatu tuturan tidak hanya memberikan informasi, selain memberikan informasi penutur juga menghendaki suatu tindakan yang harus dilakukan oleh mitra tutur.

Tindak tutur deklaratif merupakan tindak tutur yang menghendaki adanya perubahan suatu kondisi yang dimaksud pada isi wacana yang diujarkan oleh penutur. Nirmala (2015) menyatakan tindak tutur ilokusioner deklaratif adalah tindak yang memberikan indikasi bahwa berhasilnya suatu tuturan dapat dikatakan berhasil apabila adanya kesesuaian antar proposisi dengan realitas. Lebih lanjut Ekawati (2017) menyatakan tindak tutur ilokusioner deklaratif merupakan tindak tutur yang memiliki kesesuaian dengan proposisi dan realitas, seperti memecat, mengesahkan, membatalkan, melarang dan sebagainya.

Pragmatik sebagai salah satu kajian ujaran bahasa terikat pada konteks suatu tuturan tersebut diujarkan. Artinya dalam kajian linguistik dengan pendekatan pragmatik ialah menelaah maksud suatu ujaran. Hal ini berbeda dengan kajian linguistik semantik yang mengkaji bahasa dari segi linguistik saja atau bersifat diadis. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kajian pragmatik merupakan salah satu subdisiplin ilmu linguistik yang mengkaji ujaran bahasa dengan mengaitkannya dengan konteks tuturan tersebut.

Berhubungan dengan perbedaan makna dalam kajian linguistik yang telah diuraikan di atas maka perlu adanya pertimbangan dalam melakukan studi pragmatik. Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam studi pragmatik adalah situasi tutur. Situasi tutur meliputi lima aspek. Pertama, penutur dan lawan tutur (dalam konteks studi ini adalah penulis dan pembaca). Kedua, konteks tuturan dalam studi pragmatik adalah semua pandangan dunia atau pengetahuan yang dimiliki bersama antara penutur dan mitra tutur. Ketiga, tujuan tuturan suatu tindak tutur memiliki maksud dan tujuan, seperti wujud tuturan yang digunakan.

Keempat, tuturan sebagai tindakan atau aktivitas. Kelima, tuturan sebagai produk tindak verbal, artinya dalam studi pragmatik suatu tuturan dapat menghendaki mitra tuturnya untuk melakukan suatu tindakan (Wijana & Rohmadi, 2009).

Kajian pragmatik dan wacana politik selama ini masih terpisah sehingga perlu adanya pengintegrasian yang disebut studi politikopragmatik. Studi politikopragmatik merupakan kajian kebahasaan yang menempatkan objek kajiannya pada wacana politik. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Prayitno (2015) studi kebahasaan yang mendasarkan pada pesan-pesan politik untuk dapat dijadikan sebagai kajian politik melalui politikopragmatik. Hal ini menunjukkan bahwa studi pragmatik telah menjelajah tanpa batas pada era komunikasi dan komputasi industri 4.0 saat ini (Prayitno et.al 2018). Kajian politikopragmatik dalam konteks penelitian ini adalah mengkaji wujud tindak tutur deklaratif pada judul berita pemilu 2019.

Berdasarkan uraian yang telah disajikan di atas, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penanda-penanda deklaratif pada judul berita pemilu 2019. Pemilihan judul berita pemilu 2019 sebagai sumber data dalam penelitian ini karena banyak digunakan bentuk-bentuk tindak tutur ilokusioner deklaratif. Selain itu, penelitian tindak tutur yang mengkaji judul berita belum banyak dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menghasilkan deskripsi wujud tindak tutur deklaratif pada judul berita pemilu 2019. Sesuai dengan metode penelitian kualitatif. Data dalam penelitian kualitatif bukanlah angka-angka, namun berupa kata, kalimat, wacana, dan atau gambar-gambar. Data dalam penelitian ini berupa kalimat-kalimat pada judul berita pemilu 2019 yang memiliki penanda tindak tutur deklartif. Sumber data dalam penelitian ini berupa judul berita pemilu 2019 yang diberitakan oleh (CNN Indonesia, Liputan 6, Okezone News, Detikcom, Berita, Vivanews, Antara News, dan Metronews). Penelitian ini dilakukan selama satu bulan yakni pada bulan Desember 2018.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan simak dilanjutkan dengan teknik catat atau pencatatan. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini berupa judul berita pemilu 2019 yang memiliki penanda tindak tutur deklaratif yang diperoleh pada Bulan Desember 2018. Metode simak dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penyimakan, yakni menyimak penggunaan judul berita pemilu 2019 yang memiliki penanda tindak tutur deklaratif. Selanjutnya setelah diperoleh data melalui penyimakan kemudian dilakukan pencatatan data pada kartu data yang sesuai bentuk tindak tutur deklaratif pada judul berita pemilu 2019.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan intralingual (Mahsun, 2014) dan padan pragmatis (Sudaryanto, 2015:18). Metode padan intralingual dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi wujud tindak tutur deklaratif pada judul berita pemilu. Metode padan pragmatis digunakan untuk menentukan konteks tuturan yang dapat ditelusuri pada berita pemilu 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wujud tindak tutur deklaratif dalam wacana berita pemilu 2019 dapat dikelompokkan menjadi empat wujud tindak tutur yang meliputi: (1) tindak tutur deklaratif melarang; (2) tindak tutur deklaratif memutuskan; (3) tindak tutur deklaratif membatalkan; dan (4) tindak tutur deklaratif mengesahkan. Berikut ini disajikan wujud tindak tutur deklaratif pada wacana berita pemilu 2019.

Tabel 1.
Distribusi Tindak Tutur pada Wacana Berita Pemilu 2019

| No | Tindak Tutur Deklaratif | Jumlah Data | Presentase |
|----|-------------------------|-------------|------------|
| 1 | Melarang | 32 | 28,4% |
| 2 | Memutuskan | 43 | 38% |
| 3 | Membatalkan | 30 | 26,6% |
| 4 | Mengesahkan | 8 | 7% |
| | Jumlah | 113 | 100% |

A. Tindak Tutur Deklaratif Memutuskan

Tindak tutur deklaratif memutuskan merupakan tuturan yang bertujuan untuk memutuskan suatu hal atau perkara. Penanda tindak tutur deklaratif memutuskan pada judul berita pemilu 2019 dibagi menjadi delapan penanda. Kedelapan penanda tidak tutur deklaratif pada judul berita pemilu 2019 meliputi: (1) penanda dukung; (2) penanda harus; (3) penanda pastikan; (4) penanda janji; (5) penanda ikrar; (6) penanda siap; (7) penanda sepakat; dan (8) penanda tegaskan.

1. Tindak Tutur Deklaratif Memutuskan dengan Penanda Dukung

Tindak tutur deklaratif memutuskan bertujuan untuk memutuskan suatu hal. Tindak tutur deklaratif berpenanda dukung pada judul berita pemilu 2019 bertujuan untuk memutuskan suatu dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2019. Berikut ini wujud tidak tutur deklaratif berpenanda dukung pada judul berita pemilu 2019.

(1) *“PBB Akan Deklarasikan Dukung Jokowi-Ma’ruf di Rakernas Januari 2019 (Liputan 6, 1-12-2018)”*

Konteks: Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra di Istana Bogor. Yusril menyampaikan akan mendeklaratifkan dukungan untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf pada Januari 2019.

Tuturan pada data (1) di atas merupakan bentuk tindak tutur deklaratif memutuskan. Penanda dukung pada judul berita di atas menunjukkan bentuk deklaratif memutuskan. Penanda dukung tersebut merupakan wujud memutuskan sikap PBB yang akan mendukung Jokowi-Ma’ruf di Rakernas Januari 2019.

Pemberitaan pada judul berita tersebut di atas menginformasikan mengenai PBB akan melakukan deklarasi untuk mendukung paslon 01. Hal tersebut disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya partai tersebut tidak mendukung paslon nomor urut 01. Dinamika partai politik saat pemilu begitu cepat, yang terkadang membuat suatu keputusan yang mengejutkan. Bahkan Aminuddin dan Ramadlan (2009) menyatakan momen politik pemilu menimbulkan pragmatisme politik hal tersebut dapat diamati dari pola koalisi dan perubahan dalam koalisi.

2. Tindak Tutur Deklaratif Memutuskan dengan Penanda Harus

Tindak tutur deklaratif memutuskan berpenanda harus pada judul berita pemilu 2019 bertujuan untuk bersama-sama memutuskan pemilu 2019 yang mempersatukan. Berikut ini wujud tindak tutur deklaratif memutuskan berpenanda harus pada judul berita pemilu 2019.

(2) *“Ketum Golkar: Pemilu 2019 Harus Mempersatukan, Bukan Memecah (Liputan 6, 1-12-2018)”*

Konteks: Ketua umum partai Golkar, Airlangga Hartato mengajak untuk membangun narasi politik optimisme, bukan politik pesimisme. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya tuduhan Soeharto sebagai guru korupsi.

Tuturan pada data (2) di atas merupakan tuturan tindak tutur deklaratif memutuskan. Penanda yang menunjukkan deklaratif memutuskan adalah pada kata harus. Tuturan tersebut muncul karena ketua umum partai Golkar yakni Airlangga Hartato mengajak dan memutuskan untuk membangun narasi-narasi politik yang membangun sikap percaya diri, bukan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut tuturan data (12) merupakan bentuk tindak tutur deklaratif memutuskan dengan penanda kata harus.

Partai politik berperan penting dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Bahkan dapat dikatakan baik atau buruknya kualitas demokrasi ditentukan oleh partai politiknya. Berkaitan dengan pemilu dan partai politik Asshiddiqie(2006) menyatakan pemilu merupakan transformasi aspirasi politik partai menjadi kebijakan negara.

3. Tindak Tutur Deklaratif Memutuskan dengan Penanda Pastikan

Tindak tutur deklaratif memutuskan berpenanda pastikan dalam judul berita pemilu bertujuan untuk memberikan kepastian. Kepastian yang dimaksud pada judul berita pemilu 2019 adalah kepastian kehadiran pasangan nomor urut 02 pada acara reuni 212. Berikut ini wujud tindak tutur deklaratif memutuskan berpenanda pastikan pada judul berita pemilu 2019.

(3) *“Fadli Zon Pastikan Prabowo Datang Reuni Aksi 212 (CNN Indonesia, 2-12-2018)”*

Konteks: Wakil ketua umum Gerindra, Fadli Zon memastikan calon nomor urut 02 akan menghadiri Reuni aksi 212. Fadli zon dan Prabowo sebelumnya sarapan bersama dan memutuskan menghadiri acara reuni 212.

Tuturan pada data (3) di atas merupakan bentuk tindak tutur deklaratif memutuskan dengan penanda kata pasti. Penanda pasti pada tuturan (17) memberikan makna memutuskan, pada tuturan tersebut terlihat bahwa Prabowo memutuskan dengan pasti akan menghadiri reuni aksi 212 di Monas.

Tuturan pada judul berita tersebut di atas merupakan wujud tuturan deklaratif. Tuturan deklaratif pada data di atas ditunjukkan melalui penanda pastikan, yakni memutuskan dan memastikan Prabowo akan menghadiri Reuni 212. Kehadiran Prabowo dalam aksi 212 menimbulkan beberapa sentimen lawan politiknya, karena dikhawatirkan akan melakukan kampanye.

4. Tindak Tutur Deklaratif Memutuskan dengan Penanda Janji

Tindak tutur deklaratif memutuskan berpenanda janji digunakan penutur untuk memberikan rasa percaya kepada mitra tutur. Tindak tutur deklaratif berpenanda janji dalam judul berita pemilu 2019 digunakan untuk memutuskan dan memberi janji kepada penyandang difabel yang akan dilibatkan pada pelaksana UU nomor 8 Tahun 2016. Berikut ini wujud tidak deklaratif berpenanda janji pada judul berita pemilu 2019.

(4) *“Prabowo Janji Libatkan Penyandang Difabel Penuhi UU Disabilitas (DETIKCOM, 4-12-2018)”*

Konteks: Prabowo bertemu dengan komunitas disabilitas Indonesia di rumahnya jalan Kartanegara Jakarta selatan. Prabowo memutuskan dan berjanji untuk melibatkan disabilitas dalam pelaksanaan UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan oleh TKN yang diwakili oleh wakil sekjen Gerindra yakni Sudaryono.

Hari Kusmanto: Tindak Tutur Ilokusioner Deklaratif Pada Wacana Berita Pemilu 2019...

Tuturan pada data (4) di atas merupakan pemberitaan pemilu yang berkaitan dengan janji Prabowo apabila menjadi Presiden akan melibatkan difabel dalam pelaksanaan UU nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Tuturan tersebut merupakan bentuk kalimat deklaratif memutuskan, penanda yang menunjukkan memutuskan pada kata janji. Melalui tuturan tersebut Prabowo berjanji dan sekaligus memutuskan melibatkan difabel dalam pelaksanaan undang-undang tentang penyandang disabilitas.

Tuturan pada data judul berita di atas menyatakan bahwa Prabowo akan melibatkan penyandang kaum difabel untuk merealisasikan UU disabilitas. Isu difabel dalam kontestasi politik Indonesia masih terlihat kurang diperhatikan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Salim (2015) isu difabel merupakan isu yang masih langka yang dipahami calon legislator. Apabila cawapres memperhatikan isu difabel ini tentu akan lebih baik, baik paslon nomor urut 01 maupun 02.

5. Tindak Tutur Deklaratif Memutuskan dengan Penanda Ikrar

Tindak tutur deklaratif berpenanda ikrar bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada mitra tutur mengenai keputusan penutur. Tujuan tindak tutur deklaratif berpenanda ikrar pada judul berita pemilu 2019 bertujuan untuk menyakinkan mitra tutur mengenai keputusan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Berikut ini wujud tindak tutur deklaratif berpenanda ikrar pada judul berita pemilu 2019.

(5) *“Bupati Terpilih Timor Tengah Selatan Ikrar Cegah Praktik Korupsi Sejak Dini*

(Berita, 5-12-2018)”

Konteks: Bupati Timor Tengah yakni Egusem Piether setelah usai sidang putusan sengketa pilkada di Jakarta berikrar mengencarkan pencegahan praktik rasuah di pemerintahan.

Tuturan pada data (5) di atas merupakan pemberitaan pemilu yang berkaitan dengan keputusan Bupati Timor Tengah yang akan mencegah praktik korupsi. Tuturan tersebut di atas merupakan bentuk kalimat deklaratif memutuskan, penanda yang menunjukkan memutuskan terdapat pada kata ikrar. Ikrar merupakan salah satu bentuk komitmen dan suatu keputusan seseorang, dalam konteks penelitian ini adalah keputusan Bupati Timor Tengah Egusem Piether untuk memerangi korupsi di lingkungan pemerintahan.

Pemberitaan pada data di atas memberitakan mengenai terpilihnya bupati Timor Tengah dan berikrar akan mencegah praktik korupsi. Permasalahan korupsi bagi bangsa Indonesia merupakan masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Perlu adanya strategi khusus untuk dapat menyelesaikan korupsi di Indonesia. Kurniawan (2009) menyatakan pentingnya peran publik dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan. Hal ini menunjukkan untuk memberantas korupsi perlu adanya kolaborasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Waluyo (2014) menyatakan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistik.

6. Tindak Tutur Deklaratif Memutuskan dengan Penanda Sepakat

Tindak tutur deklaratif memutuskan berpenanda sepakat bertujuan memutuskan sesuatu untuk suatu kesepakatan tertentu. Tindak tutur deklaratif memutuskan berpenanda sepakat pada judul berita pemilu 2019 bertujuan untuk menemukan kesepakatan demi menyukseskan pemilu yang aman, damai dan sejuk pada 2019. Berikut ini wujud tindak tutur deklaratif memutuskan pada judul berita pemilu 2019.

(6) “Kapolres Situbondo Bersama Netizen Sepakat Dukung Pemilu 2019 Aman, Damai dan Sejuk (Berita, 7-12-2018)”

Konteks: Untuk mendukung suksesnya pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk, Kapolres Situbondo menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan netizen untuk bersama-sama mendukung pemilu yang damai dan sejuk. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Situbondo, Pejabat utama kasubbag Humas, dan Netizen Polres Situbondo.

Tuturan data (6) di atas merupakan pemberitaan mengenai keputusan Kapolres Situbondo untuk bersama-sama dengan *netizen* mendukung pemilu yang damai dan sejuk pada tahun 2019. Tuturan di atas merupakan tuturan deklaratif yang bertujuan memutuskan pemilu damai, aman, dan sejuk untuk menyukseskan pemilu 2019. Penanda yang menunjukkan kalimat deklaratif memutuskan terlihat pada kata sepakat, kesepakatan dalam pemberitaan di atas adalah kesepakatan mendukung pemilu damai dan sejuk 2019.

Pemberitaan pada data di atas berisi mengenai ajakan melaksanakan pemilu 2019 dengan aman, damai, dan sejuk atau pemilu berintegritas. Alvons(2018) menyatakan melalui kebebasan keamanan, keadilan dan kedamaian pemilu akan menjaga stabilitas negara. Realisasi pemilu yang berintegritas merupakan salah satu aspek yang penting bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Pemilu berintegritas dapat terealisasi apabila terjalin kesepakatan dari berbagai pihak termasuk partai politik. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Rahmatunnisa(2017) bahwa partai politik memainkan peran penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

7. Tindak Tutur Deklaratif Memutuskan dengan Penanda Tegaskan

Tindak tutur deklaratif memutuskan dengan berpenanda tegaskan bertujuan untuk memutuskan sesuatu hal dengan memberikan ketegasan. Tindak tutur deklaratif berpenanda tegaskan pada judul berita pemilu 2019 bertujuan untuk memberikan keputusan dukungan kepada pasangan calon Presiden. Berikut ini tindak tutur deklaratif berpenanda tegaskan pada judul berita pemilu 2019.

(7) “Ulama NU Bekasi Tegaskan Dukungan ke Jokowi-Ma’ruf (CNN Indonesia, 10-12-2018)”

Konteks: sekitar 25 ulama NU yang dipimpin oleh ketua cabang NU Kabupaten Bekasi deklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf di rumah Ma’ruf Amin Jalan Situbondo Menteng, Jakarta Pusat.

Tuturan pada data (7) di atas memberitakan mengenai dukungan ulama NU untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01. Tuturan tersebut disampaikan oleh ketua cabang NU Kabupaten Bekasi. Tuturan tersebut di atas merupakan kalimat deklaratif memutuskan, penanda memutuskan pada tuturan di atas terlihat pada penggunaan kata tegaskan. Ulama NU Kabupaten Bekasi memutuskan dan sekaligus menegaskan dukungannya kepada pasangan nomor urut 01 yakni Jokowi-Ma’ruf Amin.

Kontestasi pilpres selalu membawa dampak yang meluas bahkan seluruh lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat yang dimaksud dalam artikel ini adalah kaum intelektual, tokoh masyarakat termasuk tokoh organisasi, orang awan, dan sebagainya. Hal ini juga terlihat pada data di atas, judul pemberitaan tersebut di atas menyatakan bahwa ulama NU memberikan dukungan kepada cawapres nomor urut 01. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Sutanto(2019) bahwa kandidat dalam kontestasi politik banyak menggunakan tokoh yang mendukung visi misi untuk menyampaikan pesan kampanye kandidat. Ulama sebagai tokoh agama sudah pasti memiliki pengaruh yang kuat terhadap

masyarakat. Apabila seorang ulama mendukung salah satu paslon, maka santrinya akan ikut mendukung paslon yang didukung ulama tersebut.

B. Tindak Tutur Deklaratif Melarang

Tindak tutur deklaratif melarang bertujuan untuk melarang suatu hal atau tindakan. Tindak tutur deklaratif melarang dalam penelitian ini yakni judul berita pemilu 2019 ditemukan delapan jenis penanda. Delapan jenis penanda tindak tutur deklaratif melarang meliputi: (1) penanda jangan; (2) penanda tolak; (3) penanda larang; (4) penanda enggak boleh; (5) penanda belum diizinkan; (6) penanda dilarang; (7) penanda tak; dan (8) penanda nggak usah. Berikut ini disajikan delapan jenis tindak tutur deklaratif melarang pada judul berita pemilu.

1. Tindak Tutur Deklaratif Melarang Dengan Penanda Jangan

Tindak tutur deklaratif melarang bertujuan melarang mitra tutur untuk tidak melakukan sesuatu. Tindak tutur deklaratif melarang berpenanda jangan pada judul berita bertujuan melarang ulama berdakwah secara provokatif. Berikut ini tindak tutur deklaratif melarang berpenanda jangan pada judul berita pemilu 2019.

(8) *“Sandiaga soal Habib Smith: Ulama Berdakwah Jangan Provokatif (CNN Indonesia, 1-12-2018)”*

Konteks: calon Wakil Presiden nomor urut 02 menghimbau seluruh ulama supaya menyampaikan pesan perdamaian dalam berdakwah. Hal tersebut disampaikan sebagai tanggapan proses hukum yang dijalani Habib Smith, karena menyampaikan pernyataan soal Jokowi.

Tuturan pada data (8) di atas merupakan pemberitaan mengenai ulama yang berdakwah dengan provokatif. Tuturan tersebut di atas disampaikan oleh calon Waki Presiden 02 Sandiaga Uno. Tuturan tersebut di atas termasuk dalam kalimat deklaratif dengan wujud melarang. Penanda kalimat deklaratif melarang pada data di atas terlihat pada kata jangan. Kata jangan pada data di atas merupakan larangan sandiaga Uno kepada para ulama dalam berdakwah jangan provokatif.

Tuturan pada judul berita di atas dakwah yang dilakukan oleh ulama seharusnya tidak provokatif. Tuturan pada data di atas merupakan tindak tutur deklaratif. Penanda yang menunjukkan tindak tutur deklaratif adalah penggunaan kata *Ulama Berdakwah Jangan Provokatif*. Penanda jangan pada tuturan merupakan penanda deklaratif melarang, yakni dakwah dengan provokatif.

2. Tindak Tutur Deklaratif Melarang Dengan Penanda Tolak

Tindak tutur deklaratif melarang berpenanda tolak bertujuan untuk menolak sesuatu hal untuk dilakukan oleh mitra tutur. Tindak tutur deklaratif berpenanda tolak pada judul berita pemilu bertujuan untuk menolak adanya politik uang pada pemilihan legislatif 2019. Berikut ini wujud tindak tutur deklaratif berpenanda tolak pada judul berita pemilu 2019.

(9) *“Caleg Perindo Henry Indraguna Serukan Tolak Amplop di Pileg 2019 (Okezone News, 2-12-2018)”*

Konteks: Henry menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menolak segala bentuk uang politik dari para caleg 2019. Suap yang diberikan akan membuat caleg yang terpilih di perlemen cenderung korupsi.

Tuturan pada data (9) di atas merupakan pemberitaan mengenai seruan untuk menolak politik Amplop atau uang pada pemilihan legislatif 2019. Tuturan tersebut di atas disampaikan oleh calon legislatif partai Perindo, Henry Indraguna. Tuturan tersebut

merupakan bentuk tuturan deklaratif dengan tujuan melarang. Penanda deklaratif melarang pada tuturan tersebut terdapat pada kata tolak.

Tuturan pada data di atas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa politik amplop atau uang merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak seharusnya dilakukan. Media, dalam konteks artikel ini adalah pemberitaan online mengenai pemilu menjadi sebuah pendidikan politik. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Flora(2019) bahwa media pada saat ini mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

3. Tindak Tutur Deklaratif Melarang Dengan Penanda Larang

Tindak tutur deklaratif melarang berpenanda larang bertujuan untuk melarang mitra tutur. Deklaratif melarang berpenanda larang pada judul berita pemilu 2019 bertujuan untuk melarang mengibarkan bendera selain merah putih dalam acara istigosah. Berikut ini wujud tindak tutur deklaratif melarang berpenanda larang pada judul berita pemilu 2019.

(10) *“300 Pesantren NU Garut Istigosah Kubro, Larang Bendera Selain Merah Putih (Liputan 6, 3-12-2018)”*

Konteks: Kegiatan Istigosah Kubro yang dilakukan murni kegiatan agama bukan politik.

Tuturan pada data (10) di atas memberitakan mengenai pengajian istigosah yang dilakukan oleh kiai NU, dalam kegiatannya tersebut terdapat larangan mengibarkan bendera selain merah putih. Tuturan tersebut di atas merupakan tuturan deklaratif dengan tujuan melarang. Larangan yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut adalah mengibarkan bendera selain merah putih dalam acara istigosah.

Penanda deklaratif larangan pada data di atas terdapat pada kata larang yang memiliki arti melarang. Pelarangan pada data di atas adalah larangan untuk mengibarkan bendera selain merah putih pada acara istigosah kubro. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kegiatan tersebut supaya murni kegiatan agama bukan agama yang dibungkus politik.

4. Tindak Tutur Deklaratif Melarang Dengan Penanda Enggak Boleh

Tindak tutur deklaratif melarang berpenanda enggak boleh bertujuan untuk melarang mitra tutur melakukan sesuatu hal. Tindak tutur deklaratif melarang berpenanda enggak boleh pada judul berita pemilu 2019 bertujuan melarang satpol PP untuk berkampanye. Berikut ini wujud tindak tutur deklaratif berpenanda enggak boleh pada judul berita pemilu 2019.

(11) *“Mendagri: Satpol PP Enggak Boleh Kampanye, tapi Wajib Menjelaskan Keberhasilan Pemerintah (Okezone News, 5-12-2018)”*

Konteks: Mendagri Tjahjo Kumolo hadir dalam Rakornas kepala satuan polisi pamong praja seluruh indoneis dalam rangka mendukung suksesnya pemli 2019 di media tower hotel, Jakarta.

Tuturan data (11) di atas merupakan pemberitaan mengenai pidato Mendagri yakni Tjahjo Kumolo yang mengatakan bahwa satpol PP tidak boleh berkampanye. Tuturan pada data di atas merupakan bentuk tuturan deklaratif dengan tujuan melarang. Penanda deklaratif melarang pada tuturan di atas terlihat pada kata Enggak Boleh. Penggunaan kata Enggak Boleh merupakan bentuk larangan.

Pemberitaan pada data di atas Mendagri menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh ikut kampanye. Aparatur dalam konteks judul berita pemilu di atas adalah satpol PP. Netralitas ASN dalam pemilu merupakan hal yang sangat penting,

Hari Kusmanto: Tindak Tutur Ilokusioner Deklaratif Pada Wacana Berita Pemilu 2019...

mengingat daya atau kekuatan dalam mengajak masa untuk melakukan politik praktis. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Rahmatunnisa (2017) bahwa idependensi aparatur sipil sangat urgen mengingat posisi birokrasi yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi masa.

5. Tindak Tutur Deklaratif Melarang Dengan Penanda Belum izinkan

Tindak tutur deklaratif melarang berpenanda belum izinkan bertujuan untuk lebih menghaluskan kata melarang. Deklaratif penanda belum izinkan pada judul berita pemilu 2019 digunakan untuk melarang Ma'ruf Amin untuk jalan karena sebelumnya sakit. Berikut ini wujud tindak tutur deklaratif berpenanda belum izinkan pada judul berita pemilu 2019.

(12) *“Deddy Mizwar: Ma'ruf Amin Sudah Sehat, Tapi Dokter Belum Izinkan Jalan (Liputan 6, 9-12-2018)”*

Konteks: Tim kampanye nasional Dedy Mizwar kondisi cawapres sudah membaik dan dapat kembali berkampanye.

Tuturan pada data (12) di atas memberitakan mengenai Ma'ruf Amin yang sebelumnya sedang sakit. Tuturan tersebut disampaikan oleh tim kampanye nasioanal pasangan nomor 01, Deddy Mizwar. Tuturan tersebut di atas merupakan bentuk tuturan deklaratif melarang. Penanda deklaratif melarang pada tuturan tersebut di atas terlihat pada frasa *belum izinkan*. Penggunaan frasa belum izinkan sebenarnya memiliki arti yang sama dengan melarang yakni dokter yang melarang Ma'ruf Amin untuk beraktivitas seperti biasa. Frasa belum izinkan merupakan penghalusan kata melarang.

6. Tindak Tutur Deklaratif Melarang Dengan Penanda Dilarang

Tindak tutur selanjutnya adalah deklaratif berpenanda dilarang. Penanda dilarang pada judul berita pemilu 2019 digunakan untuk melarang calon legislatif saling sikut. Berikut ini wujud tidak tutur deklaratif melarang berpenanda dilarang pada judul berita pemilu 2019.

(13) *“Caleg PDIP Dilarang Saling Sikut dalam Pemilu 2019 (Berita, 9-12-2018)”*

Konteks: Ketua DPP PDIP Bali, wayan koster meminta kadernya untuk solid memenangkan pemilu 2019.

Tuturan pada data (13) merupakan pemberitaan mengenai larangan calon legislatif PDIP saling sikut dalam gelaran pemilu 2019. Tuturan tersebut di atas disampaikan oleh ketua DPP PDIP Bali yakni Wayan Koster. Tuturan tersebut merupakan kalimat deklaratif pelarangan. Penanda deklaratif pelarangan pada data tersebut terlihat melalui penggunaan kata dilarang.

Kata dilarang tersebut disampaikan oleh ketua DPP PDIP Bali kepada seluruh kadernya supaya tidak saling sikut dan menyerukan supaya bersatu dan solid. Caleg dan partai politik seharusnya menjadi pilar dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Malik(2016) menyatakan salah satu faktor keberhasilan partai politik untuk meningkatkan dukungan adalah adanya solidaritas parta artinya tidak terjadi konflik internal partai.

7. Tindak Tutur Deklaratif Melarang Dengan PenandaTak

Tindak tutur deklaratif melarang berpenanda tak pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan penanda tidak. Perbedaananya kata tak merupakan kata yang tidak baku. Berikut ini tindak tutur deklaratif berpenanda tak pada judul berita pemilu 2019.

(14) “*Jokowi Pesan Relawan Tak Terpancing Narasi Negatif Kampanye Kubu Prabowo (Liputan 6, 27-12-2018)*”

Konteks: Sekjen DPP PDIP Hastato Krisyanto mengkritik pernyataan Prabowo yang menjajarkan Indonesia dengan negara-negara miskin di dunia.

Tuturan data (14) merupakan pemberitaan mengenai larangan atau himbaun Jokowi kepada relawan untuk tidak terpancing dengan narasi-narasi negatif kampanye yang dilakukan kubu nomor urut 02. Tuturan tersebut di atas merupakan bentuk tuturan deklaratif larangan dengan tujuan melarang. Penanda melarang pada tuturan tersebut ditunjukkan pada kata tak atau tidak, yakni tidak atau jangan terpancing dengan narasi negatif kampanye kubu nomor urut 02. Selanjutnya judul berita tindak tutur deklaratif berpenanda nggak usah.

(15) “*Masyarakat Nggak Usah Baper Bawa Agama ke Politik (29-12-2018)*”

Konteks: Inayah Wulandari Putri, menyarankan pada pemilu 2019 supaya memisahkan urusan politik dengan agama.

Tuturan selanjutnya pada data (15) merupakan pemberitaan mengenai agama dan politik. Tuturan pada data di atas disampaikan oleh Inayah Wulandari Putri, anak perempuan keempat Abdurahman Wahid. Tuturan tersebut merupakan bentuk tuturan deklaratif dengan tujuan malarang, adapun yang dilarang adalah masyarakat jangan mencampurkan urusan agama dan politik. Penanda tuturan deklaratif melarang pada tuturan tersebut di atas terlihat pada kata Nggak Usah. Penggunaan kata Nggak usah, memiliki arti yang sama dengan kata jangan.

C. Tindak Tutur Deklaratif Membatalkan

Tindak tutur deklaratif membatalkan merupakan tindak tutur yang bertujuan membatalkan sesuatu hal yang sebelumnya telah ditetapkan. Penanda tindak tutur deklaratif pada judul berita pemilu 2019 ditemukan sebanyak enam penanda. Keenam penanda tersebut meliputi: (1) penanda melawan; (2) penanda tolak; (3) penanda tepis; (4) penanda bantah; (5) penanda tak benar; dan (6) penanda coret.

1. Tindak Tutur Deklaratif Membatalkan Dengan Penanda Melawan

Tindak tutur deklaratif membatalkan berpenanda melawan bertujuan untuk melawan suatu pernyataan yang tidak baik kepada seseorang. Deklaratif berpenanda melawan dalam judul berita pemilu 2019 bertujuan melawan tuduhan Soeharto sebagai guru korupsi Indonesia. Berikut ini judul berita pemilu 2019 deklaratif berpenanda melawan

(16) “*Tommy Melawan Tudingan Soeharto Guru Koruptor (Detik.com, 1-12-2018)*”

Konteks: Basarah menanggapi pernyataan Prabowo yang menyatakan korupsi sudah mencapai stadium 4. Basarah menilai guru korupsi Indonesia adalah mantan Presiden Soeharto.

Tuturan pada data (16) di atas merupakan pemberitaan mengenai Tommy yang tidak terima dengan tudingan Soeharto sebagai guru korupsi Indonesia. Tuturan tersebut disampaikan oleh Tommy sebagai tanggapan terhadap tudingan Soeharto sebagai guru korupsi yang disampaikan oleh Basarah. Pada tuturan tersebut di atas Tommy berusaha membatalkan tudingan tersebut. Tuturan tersebut merupakan wujud tuturan deklaratif dengan tujuan membatalkan pernyataan Basarah. Penanda deklaratif membatalkan pada tuturan di atas terlihat pada kata melawan.

Wacana dalam pemberitaan di atas merupakan tudingan mengenai Soeharto sebagai guru koruptor. Tudingan tersebut disampaikan oleh Prabowo bahwa korupsi sudah mencapai stadium empat. Tommy sebagai putra Soeharto melawan tudingan Prabowo tersebut. Korupsi memang sudah ada sejak orde lama sampai sekarang, kepemimpinan Soeharto terjadi tindak korupsi yang parah. Bahkan Santoso(2013) menyebutkan pada era soeharto, yakni Mei 1998 memberikan dampak euforia demokrasi sebagai efek kejatuhannya.

2. Tindak Tutur Deklaratif Membatalkan Dengan Penanda Tolak

Tindak tutur deklaratif membatalkan berpenanda tolak bertujuan menolak sesuatu hal yang telah ditetapkan. Deklaratif berpenanda tolak pada judul berita pemilu 2019 bertujuan menolak istilah yang diberikan mengenai Soeharto sebagai guru korupsi Indonesia. Berikut ini deklaratif berpenanda tolak pada judul berita pemilu 2019.

(17) *“Eks Menteri Jokowi Tolak Istilah Soeharto Guru Korupsi (Liputan6, 1-12-2018)”*

Konteks: Penurunan rezim Soeharto pada tahun 1998 dilandai tiga hal yakni Alasan KKN, dan Prabowo pada saat itu berada disana mempertahankan Pak Harto.

Tuturan data (17) sebagai bentuk pemberitaan menolak tudingan guru korupsi. Tuturan tersebut disampaikan oleh eks menteri Jokowi sebagai upaya membatalkan pernyataan sebelumnya yang disampaikan Basarah, bahwa Soeharto adalah guru korupsi. Tuturan tersebut sebagai wujud tuturan deklaratif membatalkan. Penanda deklaratif membatalkan pada tuturan tersebut di atas terlihat pada kata tolak.

Wacana pada data di atas masih berkaitan dengan soeharto sebagai guru korupsi. Tuturan pada data di atas merupakan wujud tindak tutur deklaratif membatalkan. Penanda membatalkan yang digunakan pada judul berita dengan kata tolak. Adapun penurunan rezim Soeharto pada Mei 1998, Prabowo ikut mempertahankan Soeharto pada saat itu.

3. Tindak Tutur Deklaratif Membatalkan Dengan Penanda Tepis

Tindak tutur deklaratif berpenanda tepis bertujuan untuk menepis atau menolak sesuatu hal yang telah ditetapkan atau dilabelkan kepada orang lain. Deklarasi berpenanda tepis pada judul berita pemilu 2019 bertujuan menepis atau membatalkan pernyataan Prabowo yang menyatakan korupsi Indonesia sudah stadium 4. Berikut ini wujud tindak tutur deklarasi berpenanda tepis pada judul berita pemilu 2019.

(18) *“Ketua KPK Tepis Pernyataan Prabowo soal Korupsi Indonesia Stadium 4 (Liputan 6, 1-12-2018)”*

Konteks: Prabowo menyatakan korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium 4.

Tuturan data (18) merupakan pemberitaan yang berkaitan dengan pernyataan Prabowo bahwa korupsi Indonesia mencapai stadium 4. Tuturan tersebut di atas disampaikan oleh ketua KPK dengan tujuan membatalkan pernyataan Prabowo bahwa korupsi Indonesia stadium 4. Tuturan tersebut merupakan wujud tindak tutur deklaratif membatalkan. Penanda deklaratif membatalkan terlihat pada penggunaan kata tepis yang berarti membatalkan pernyataan Prabowo. Tuturan tersebut di atas berkaitan dengan tanggapan ketua KPK yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium 4. Tanggapan tersebut muncul karena Prabowo mengatakan korupsi mencapai stadium 4.

4. Tindak Tutur Deklaratif Membatalkan Dengan Penanda Bantah

Tindak tutur deklaratif membatalkan berpenanda bantah bertujuan untuk membatalkan sesuatu hal yang sebelumnya ditetapkan. Deklaratif berpenanda bantah dalam judul berita pemilu 2019 bertujuan untuk membantah tudingan Soeharto sebagai guru korupsi. Berikut ini wujud deklaratif berpenanda bantah pada judul berita pemilu 2019.

(19) *“Sebut Soeharto Guru Korupsi, Basarah Bantah Ikut Singgung Nama Parpol (Liputan 6, 1-12-2018)”*

Konteks: Wasekjen PDIP Ahmad Basarah Klarifikasi ucapannya soal Soeharto sebagai guru Korupsi bukan untuk menyinggung partai politik manapun termasuk Golkar.

Tuturan data (19) tersebut merupakan pemberitaan mengenai Soeharto sebagai guru korupsi. Tuturan tersebut disampaikan wakil sekretaris jenderal PDIP Ahmad Basarah dengan tujuan membatalkan pernyataan bahwa dirinya menyinggung nama partai politik. Tuturan tersebut merupakan wujud tuturan deklaratif membatalkan. Penanda deklaratif membatalkan pada tuturan tersebut terlihat pada kata bantah.

Judul pemberitaan tersebut sebagai upaya klarifikasi Basarah kepada publik, bahwa dirinya tidak pernah menyinggung nama parpol manapun. Basarah hanya mengatakan bahwa Soeharto sebagai guru korupsi. Namun, apabila kita telusuri lebih lanjut bahwa Soeharto dahulu memang sebagai ketua partai politik, yakni Golkar.

5. Tindak Tutur Deklaratif Membatalkan Dengan Penanda Tak Benar

Tindak tutur deklaratif berpenanda tak benar bertujuan untuk membatalkan sesuatu hal yang sebelumnya sudah ditetapkan. Deklaratif berpenanda tak benar pada judul berita pemilu bertujuan untuk membatalkan persepsi yang mengatakan bahwa orang Islam adalah radikal. Berikut ini wujud tindak tutur deklarasi membatalkan berpenanda tak benar.

(20) *“Tak Benar Orang Islam Cenderung Radikal (Detikcom, 2-12-2018)”*

Konteks: Prabowo hadir dalam reuni 212, dalam kesempatan tersebut Prabowo menepis anggapan bahwa orang Islam itu radikal.

Tuturan pada data (20) merupakan pemberitaan mengenai penolakan tudingan orang Islam yang radikal. Tuturan tersebut di atas disampaikan oleh Prabowo pada saat menghadiri reuni 212 di Monas, tuturan tersebut bermaksud untuk membatalkan tudingan selama ini bahwa orang Islam itu cenderung radikal. Tuturan tersebut merupakan wujud deklaratif membatalkan, adapun hal yang dibatalkan adalah tudingan orang Islam yang cenderung radikal. Penanda deklaratif membatalkan terlihat pada frasa tak benar atau tidak benar.

6. Tindak Tutur Deklaratif Membatalkan Dengan Penanda Coret

Tindak tutur deklarasi membatalkan berpenanda coret bertujuan untuk membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan. Deklaratif berpenanda coret pada judul berita pemilu 2019 digunakan untuk membatalkan daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU. Berikut ini judul berita pemilu 2019 deklaratif berpenanda coret.

(21) *“KPU Akan Coret Korban Tewas Tsunami Selat Sunda dari Data Pemilih (Detikcom, 26-1-2019)”*

Konteks: KPU banten akan mencoret korban bencana tsunami yang meninggal dunia dari daftar pemilih tetap pemilu 2019.

Tuturan pada (21) di atas merupakan pemberitaan mengenai pembatalan calon pemilih pemilu 2019. Tuturan tersebut disampaikan oleh ketua KPU Banten yang akan membatalkan beberapa pemilih yang sudah ditetapkan sebelumnya, pembatalan tersebut dilakukan karena pemilih terkena bencana Tsunami dan meninggal dunia. Tuturan tersebut di atas merupakan wujud tuturan deklaratif membatalkan. Penanada yang menunjukkan membatalkan pada tuturan tersebut adalah kata coret.

D. Tindak Tutur Deklaratif Mengesahkan

Tindak tutur deklaratif mengesahkan merupakan tindak tutur yang dilakukan penutur sebagai usaha memberikan legitimasi kepada sesuatu hal termasuk orang lain atau mitra tutur. Penanda tindak tutur deklaratif pada judul berita pemilu 2019 meliputi dua penanda, yakni penanda lantik dan dinobatkan. Berikut ini tindak tutur deklaratif pada judul berita pemilu 2019 berpenanda lantik dan dinobatkan.

1. Tindak Tutur Deklaratif Mengesahkan Dengan Penanda Lantik

Tindak tutur deklaratif mengesahkan bertujuan untuk membuat sesuatu hal menjadi sah atau legal. Tindak tutur deklaratif berpenanda lantik pada judul berita pemilu 2019 bertujuan mengesahkan Wali Kota dan wakil Wali Kota. Berikut tindak tutur deklaratif berpenanda lantik pada judul berita pemilu 2019.

(22) *“Wahidin Halim Lantik Wali Kota Serang di Kawasan Masjid Banten Lama (Okezone News, 5-12-2018)”*

Konteks: Terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Syafrudin-Subandri Usuludin.

Tuturan pada data (22) di atas merupakan pemberitaan mengenai dilantiknnya wali Kota dan Wakil Kota Serang. Tuturan tersebut merupakan tuturan deklaratif mengesahkan. Penanda deklaratif mengesahkan terlihat pada penggunaan kata lantik. Penggunaan kata lantik memiliki makna yang sama dengan mengesahkan. Pemberitaan pada data di atas bersifat informatif, bahwa Wahidin Halim melantik walikota Serang yang telah terpilih, yakni Syafrudin-Subandri Usuludin.

2. Tindak Tutur Deklaratif Mengesahkan Dengan Penanda dinobatkan

Tindak tutur deklaratif mengesahkan berpenanda dinobatkan bertujuan untuk mengesahkan sesuatu hal. Deklaratif berpenanda dinobatkan pada judul berita pemilu 2019 berfungsi untuk menobatkan Prabowo sebagai dewan pembina komunitas Ojol (ojek online). Berikut ini wujud tindak tutur deklaratif berpenanda dinobatkan pada judul berita pemilu 2019.

(23) *“Prabowo Dinobatkan Jadi Dewan Pembina Komunitas Ojol (Okezone News, 17-12-2018)”*

Konteks: Prabowo menghadiri acara kopda Ojol menuju perubahan 2019 yang digelar forgab roda 2 di sirkuit Sentul, Jakarta Barat.

Tuturan data (23) merupakan pemberitaan mengenai penobatan Prabowo sebagai dewan pembina komunitas Ojol. Tuturan tersebut merupakan wujud tuturan deklaratif mengesahkan dengan tujuan mengesahkan Prabowo sebagai dewan pertimbangan komunitas Ojol. Penanda mengesahkan pada tuturan tersebut di atas terlihat pada penggunaan kata dinobatkan yang memiliki arti yang sama dengan dilantik.

Wacana tersebut merupakan gerakan masa yang mampu memobilisasi dukungan kepada Prabowo. Mauliansyah (2016) jaringan individu maupun organisasi-organisasi berlandaskan identitas kolektif mampu memobilisasi orang untuk mendukung tujuan dan aksi, serta memiliki tujuan sosial maupun politik. Konteks pada pemberitaan tersebut di atas identitas kolektif adalah komunitas ojek online (Ojol), sedangkan tujuan politiknya tentu memberikan dukung kepada Prabowo untuk menjadi presiden RI.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan di atas, dapat disimpulkan wujud tindak tutur deklaratif pada judul berita pemilu 2019 meliputi empat wujud. Keempat wujud tindak tutur deklaratif tersebut meliputi: (1) bentuk tindak tutur deklaratif memutuskan yang meliputi delapan jenis penanda seperti (a) penanda dukung; (b) penanda harus; (c) penanda pastikan; (d) penanda janji; (e) penanda ikrar; (f) penanda siap; (g) penanda sepakat; dan (h) penanda tegaskan. (2) tindak tutur deklarasi melarang dengan delapan jenis penanda yang meliputi: (a) penanda jangan; (b) penanda tolak; (c) penanda larang; (d) penanda enggak boleh; (e) penanda belum izinkan; (f) penanda dilarang; (g) penanda tak; dan (h) penanda nggak usah. (3) tindak tutur membatalkan dengan enam jenis penanda yang meliputi: (a) penanda melawan; (b) penanda tolak; (c) penanda tepis; (d) penanda bantah; (e) penanda tak benar; dan (f) penanda coret. (4) Tindak tutur deklaratif mengesahkan dengan dua jenis penanda yang meliputi: (a) penanda lantik; dan (b) penanda lantik dan dinobatkan. tindak tutur yang paling banyak digunakan dalam pemilihan judul berita pemilu 2019 adalah deklaratif memutuskan. Hal ini menunjukkan pemberitaan politik pemilu lebih banyak pada hal-hal yang sifatnya memutuskan diantaranya adalah memutuskan dukungan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvons, M. (2018). Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum untuk Stabilitas Negara. *Jurnal Legilasi Indonesia*, 15(4), 295–307.
- Aminuddin, M. F., & Ramadlan, M. F. S. (2009). Match-All Party : Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009. *Jurnal Politik*, 1(1), 39–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.9>
- Asshiddiqie, J. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Politik. *Jurnal Konstitusi*, 3(4).
- Badara, A. (2012). *Analisis Wacana Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ekawati, M. (2017). Kesantunan Semu pada Tindak Tutur Ekspresif Marah dalam Bahasa Indonesia. *Adabiyāt*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajbs.2017.01101>
- Flora, E. (2019). Analisis Framing Berita Calon Presiden RI 2014-2019 pada Surat Kabar Kaltim dan Tribun Kaltim. *Ejornal Ilmu Komunikasi*, 2(3), 347–356.
- Kurniawan, T. (2009). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 116–121.
- Mahsun, M. (2014). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, dan Tekniknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Malik, D. K. (2016). Partai Politik Islam dan Pemilihan Umum: Studi Peningkatan Dukungan Elektoral PKB dan PPP Pada Pemilu Legislatif 2014 DPR RI di Dapil DKI Jakarta Donie. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, 1(1), 45–68.

<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9180>

- Mauliansyah, F. (2016). The Social and Political Aspects of New Medi (Menelusuri Jejak Kesadaran dan Tindakan Kolektif Masa). *Source Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1–12.
- Nirmala, V. (2015). Tindak Tutur Ilokusi pada Iklan Komersial Sumatera Ekspres. *Kandai*, 11(2), 139–150. <https://doi.org/10.12345/JK.V11I2.222>
- Poentarie, E. (2015). Komparasi Kebenaran, Relevansi, Keseimbangan dan Netralitas dalam Pemberitaan (Studi Konten Analisis Terkait Pemberitaan Pemilu Presiden 2014 di Harian Kompas dan Koran Sindo). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 19(1), 1–13.
- Prayitno, H. J. (2015). Tindak Kesantunan Berbahasa dalam Dialektika Pembelajaran Pragmatik: Berdaya, Berorientasi, dan Berstrategi Kesantunan Positif. *Seminar Nasional PRASASTI "Kajian Pragmatik Dalam Berbagai Bidang"*, (April), 24–35.
- Prayitno, H. J., Ngalim, A., & Jamaluddin, N. (2018). Pergeseran Realisasi Tindak Kesantunan Direktif Mereduksi Nilai Kesantunan Positif dan Karakter di Kalangan Peserta Didik. *BAHA STRA*, XXXVIII(2), 85–94. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26555/bahastra.v38i2.9689>
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting? *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1–11.
- Ratnasari, E. D., & Edel, E. E. (2017). The Illocutionary Acts in the Novel “ and the Mountains Echoed ” By Khaled Hosseini. *Jurnal KATA*, 1(1), 15–23. <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/jk.v1i1.1731>
- Salim, I. (2015). Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 127–156.
- Santoso, M. A. F. (2013). Kontribusi Etika Islam pada Pendidikan Politik: Solusi bagi Problema Civil Society Indonesi Era Reformasi. *Jurnal TSAQAFAH*, 9(2), 225–244. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i2.51>
- Sobur, A. (2015). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sutanto, M. H. (2019). Propaganda Politik Calon Presiden Republik Indonesia 2014-2019 (Analisis Isi Berita Kampanye Pemilihan Presiden 2014 pada Harian Kompas Edisi 4 Juni Sampai 5 Juli 2014). *Jurnal Humanity*, 9(2), 38–46.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–182.
- Wijana, I. D. P., & Rohmadi, M. (2009). *Analisis Wacana Praagmatik Kajian Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Yayuk, R. (2016). Strategi Tindak Tutur Imperatif Bahasa Banjar. *Metalingua*, 14(2), 225–231. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26499/metalingua.v14i2.198>
- Yule, G. (2014). *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.